

LAMPIRAN XXX

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 43 TAHUN 2019

TENTANG : PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI



**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BEKASI
TAHUN 2018-2023**

DAFTAR ISI

BAB	I	PENDAHULUAN
	1.1	Latar Belakang
	1.2	Landasan Hukum
	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN
	2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB	III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB	IV	TUJUAN, DAN SASARAN
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB	VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB	VIII	PENUTUP

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun. Dinas Perpustakaan Kota Bekasi sebagai salah satu Perangkat Daerah Kota Bekasi dalam menyusun Renstra 2018-2023, mengacu pada Visi dan Misi Kota Bekasi, sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan. Renstra ini wajib dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan Kota Bekasi. Selanjutnya Renstra Dinas Perpustakaan Daerah Kota Bekasi akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan.

Semoga semua rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 ini dapat tercapai dan bermanfaat, serta mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Jakarta, April 2019

Kepala Dinas Perpustakaan Kota Bekasi,



EDY ROSYADI, S.H, M.H

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan pada suatu kota dapat berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa setiap organisasi perangkat daerah membuat dokumen rencana pembangunan yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA).

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah milik perangkat daerah, renstra mempunyai peran yang sangat penting terutama sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Renstra menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan perangkat daerah kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program kepala daerah. Renstra berisikan langkah-langkah mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat daerah setiap tahun selama 5 tahun.

Dinas Perpustakaan Kota Bekasi menyusun dokumen renstra yang memuat program-program pembangunan bidang perpustakaan yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2018 – 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023, pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Didalam renstra ini dijabarkan potret permasalahan serta indikasi program yang akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kota Bekasi sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Dalam proses penyusunan renstra Dinas Perpustakaan telah mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam pasal 108 yang menyebutkan bahwa tata cara penyusunan renstra perangkat daerah sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan renstra perangkat daerah;
- b. Penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah;
- c. Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- e. Penyusunan rancangan akhir renstra perangkat daerah;
- f. Penetapan renstra perangkat daerah.

Renstra Dinas Perpustakaan Tahun 2018 – 2023 disusun berpedoman pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023, Renstra Perpustakaan Nasional Tahun 2014 – 2019, Renstra Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Depok, Kota Bogor dan Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Kewajiban pemerintah atas ketersediaan perpustakaan di masyarakat diperjelas pada pasal 8 butir b, menjelaskan bahwa pemerintah kota berkewajiban menjamin ketesediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing. Selaras dengan amanat tersebut, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, pasal 12, ayat 2 butir q, menyatakan bahwa perpustakaan masuk pada Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Tabel 1.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Pembinaan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan standar dan akreditasi Dinas Perpustakaan b. Pengelolaan Dinas Perpustakaan tingkat Kota Bekasi c. Pembudayaan kegemaran membaca tingkat Kota Bekasi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Dinas Perpustakaan tingkat daerah provinsi d. Pembudayaan kegemaran membaca tingkat daerah provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota b. Pembudayaan kegemaran membaca tingkat daerah kabupaten/kota
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Kota Bekasi b. Penerbitan katalog 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan koleksi budaya

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> induk Kota Bekasi dan bibliografi Kota Bekasi c. Pelestarian naskah kuno dan pengembalian naskah kuno dari luar d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang berasal dari luar negeri dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Pusat. 	<ul style="list-style-type: none"> b. Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah. c. Pelestarian naskah kuno milik Daerah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
3.	Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Dinas Perpustakaan	Penyelenggaraan sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan Dinas Perpustakaan		

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018 Penyesuaian adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126)
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;
- j. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi 2013-2018;
- l. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
- m. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
- n. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi; dan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang berisi langkah- langkah strategis lima tahunan Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah adalah :

1. Untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan;
2. Menyediakan acuan resmi bagi perangkat daerah dalam menentukan prioritas program tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan Perangkat Daerah, dan memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD;

4. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi, dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (stakeholders);
5. Menyediakan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan perangkat daerah;
6. Memelihara kesinambungan proses dan hasil- hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang penyusunan renstra, penjelasan landasan hukum yang menjadi pedoman sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan renstra serta sistematika penulisannya

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat tentang permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perpustakaan, telaahan visi, misi dan program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra Perpustakaan Nasional RI dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Memuat penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Dinas Perpustakaan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi dan yang kemudian diturunkan kembali ke Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi melaksanakan *urusan wajib Perpustakaan*, adapun tugas pokok dan fungsi yang di emban adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Dinas Perpustakaan Kota Bekasi mempunyai tugas pokok :

“Melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Perpustakaan”

b. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perpustakaan terdiri atas:

1. Kepala Badan, membawahkan:
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan, membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Koleksi;
 - b. Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - c. Seksi Konservasi Bahan Perpustakaan
4. Bidang Layanan, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan, membawahkan:
 - a. Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan;
 - b. Seksi Alih Media Perpustakaan;
 - c. Seksi Otomasi Perpustakaan
5. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawahkan:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;

b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan;

c. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar 2.1

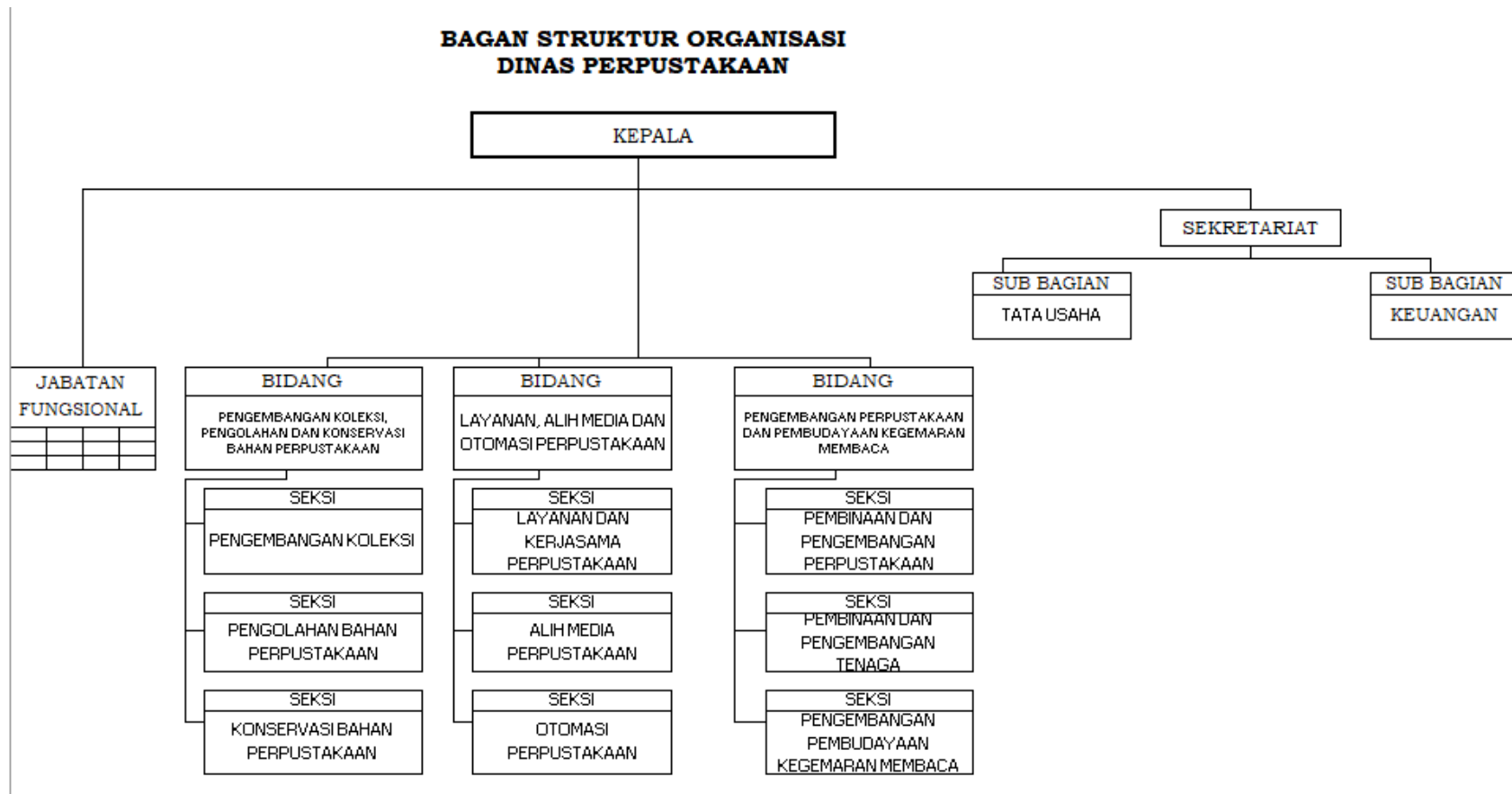
Adapun tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Kota Bekasi
(sumber: Perwal Nomor 88 Tahun 2016)

Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengembangan koleksi serta pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi daerah (local content), pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka, deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi, dan pemasukan data ke pangkalan data;
- d. pelaksanaan konservasi pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawatan, restorasi, dan penjilidan serta pembuatan sarana penyimpanan bahan perpustakaan;
- e. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan OPD terkait;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan, membawahkan:

- a. Seksi Pengembangan Koleksi ;
- b. Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan;
- c. Seksi Konservasi Bahan Perpustakaan.

Bidang Layanan, Kerjasama, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi layanan, kerjasama serta alih media dan otomasi perpustakaan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Layanan, Kerjasama, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan layanan dan kerja sama perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka, dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca, dan sejenisnya), promosi layanan, pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka, kerja sama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan
- d. pelaksanaan alih media melakukan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui alih media, pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital
- e. pelaksanaan otomasi perpustakaan meliputi pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan, serta pengelolaan website dan jaringan perpustakaan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bidang Layanan, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan, membawahkan:

- a. Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan;
- b. Seksi Alih Media Perpustakaan;
- c. Seksi Otomasi Perpustakaan.

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pembinaan dan pengembangan perpustakaan, pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan serta pengembangan pembudayaan kegemaran membaca. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;

- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pendataan perpustakaan, koordinasi pengembangan perpustakaan, dan pemasyarakatan/ sosialisasi, serta evaluasi pengembangan perpustakaan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepastakawanan, penilaian angka kredit pustakawan, koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan
- e. pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi pengkajian, dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi, pemasyarakatan/ sosialisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi kegemaran membaca;
- f. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan OPD terkait
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawahkan:

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan;
- c. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

d. Tata Kerja

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- b. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing bidang dilakukan sesuai dengan *Standar Operation Procedure* (SOP) yang telah disusun, yang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok SOP yaitu Kelompok SOP Layanan, SOP Pembudayaan Gemar Membaca, SOP Pengembangan Koleksi.

2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan

Sumber daya utama yang perlu diinformasikan dalam renstra ini antara lain sumber daya manusia yang ada di Dinas Perpustakaan Kota Bekasi, sarana prasarana pendukung yang dimiliki dan besarnya anggaran untuk penyelenggaraan seluruh kegiatan yang ada.

Uraian berikut ini memberikan gambaran secara lebih rinci terkait sumber daya organisasi Dinas Perpustakaan Kota Bekasi, yang antara lain:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia Dinas Perpustakaan Kota Bekasi akan diklasifikasi atas dasar jumlah personil untuk setiap kelompok fungsi yang terdapat pada bagian Sekretariat, Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan, Bidang Layanan, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan, Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan kelompok Jabatan Fungsional juga akan dibedakan status, golongan/ruang serta tingkat pendidikan SDM.

Sumber daya manusia Dinas Perpustakaan Kota Bekasi semuanya berjumlah 42 orang. Adapun komposisinya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Komposisi pegawai menurut kelompok fungsi

No.	Seksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala	1	-	1
2	Sekretariat	6	8	14
3	Bidang PKPKBP	4	3	7
4	Bidang LAMOP	3	5	8
5	Bidang P3K	2	5	7
6	Kelompok Jabatan Fungsional	1	4	5
JUMLAH		17	25	42

Tabel 2.2 Komposisi pegawai menurut pendidikan

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S3	1		1
2	S2	5	5	10
3	S1	6	9	15
4	D3		3	3
5	SMA	4	8	12
6	SMP	1		1
JUMLAH		17	25	42

Tabel 2.3 Komposisi pegawai berdasarkan golongan/ruang

No	Golongan Ruang	a	b	c	d	Jumlah
1.	Golongan IV	8		1		9
2.	Golongan III	2	3	6	8	19
3.	Golongan II			4	2	6
4.	Golongan I					
5.	TKK					8
JUMLAH		10	3	11	10	42

Tabel 2.4 Komposisi pegawai menurut status kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil			
	- Jabatan Struktural	8	8	16
	- Jabatan Fungsional	1	4	5
	- Staf	5	8	13
2	Pegawai TKK	3	5	8
JUMLAH		17	25	42

Sumber : Dinas Perpustakaan, Desember 2018

Pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi, Sumber daya manusia sebagai tenaga pengelola perpustakaan terdiri dari pustakawan, tenaga teknis dan tenaga pendukung. Berdasarkan SNP idealnya jumlah tenaga perpustakaan (staf) yang memiliki kualifikasi di bidang perpustakaan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang per 15.000 penduduk di wilayah kewenangan. Sedangkan Dinas Perpustakaan Kota Bekasi baru memiliki 4 orang tenaga perpustakaan yang berkualifikasi dibidang perpustakaan, atau sebanding dengan 1 : 675.000 penduduk di Kota Bekasi. Apabila mengacu SNP, secara kuantitas Kota Bekasi kekurangan 680 tenaga perpustakaan yang berkualifikasi dibidang perpustakaan.

Selain tenaga perpustakaan yang berkualifikasi dibidang perpustakaan adapula tenaga teknis yaitu tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Apabila mengacu pada SNP, jumlah seluruh tenaga perpustakaan (staf) sekurang-kurangnya 1 (satu) orang per 5000 penduduk di wilayah kewenangan. Dinas Perpustakaan Kota Bekasi didukung oleh 38 orang personil yang terdiri 14 orang laki-laki dan 24 orang perempuan. Jikalau berdasarkan struktural jumlah pejabat struktural sebanyak 16 Orang dan jumlah staf 16 Orang yang terdiri dari PNS dan NONPNS. Kalau mengikuti idealnya SNP, kuantitas tenaga perpustakaan yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan sebanding dengan 1 : 71.052 penduduk, atau masih kekurangan 500 tenaga teknis perpustakaan. Apabila dilihat dari latar belakang pendidikan dari SDM Dinas Perpustakaan masih dibutuhkan tenaga teknis perpustakaan yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan seperti sarjana teknologi informatika, sarjana akuntansi, manajemen dan keuangan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tenaga pengelola perpustakaan, Dinas perpustakaan Kota Bekasi telah melakukan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan dengan memberikan kemudahan untuk pegawai yang ingin mengikuti diklat perpustakaan, seminar/workshop kepustakawanan dan untuk mejadi anggota organisasi profesi kepustakawanan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sumber daya pendukung berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Kota Bekasi, secara umum masih sangat kurang dari segi kuantitas maupun kualitas bila ditinjau dari sudut luasnya cakupan wilayah pembinaan maupun operasional kerjanya serta tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014.

Dinas Perpustakaan Kota Bekasi memiliki gedung pelayanan yang terpisah dari kantor sekretariatnya. Gedung layanan terletak di Jalan Rawa Tembaga No. IV Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan sedangkan Sekretariat berada di Gedung 10 Lantai Pemerintah Kota Bekasi yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1 Bekasi. Gedung layanan perpustakaan

umum Kota Bekasi memiliki luas 614 m2, lokasinya kurang strategis sehingga gedung layanan perpustakaan tidak terlihat dan tidak dikenal oleh masyarakat.

SNP mengatur mengenai ruang perpustakaan yang minimal ada di perpustakaan umum tingkat kab/kota. Disebutkan bahwa ruang perpustakaan sekurang-kurangnya terdiri dari ruang koleksi, ruang baca, ruang kepala, ruang staf, ruang pengolahan, ruang serba guna, area publik (mushola dan toilet tidak berada didalam ruang koleksi. Dikarenakan luas gedung layanan perpustakaan Kota Bekasi terbatas, kami belum memiliki ruang serba guna, selama ini kami mempergunakan tempat kosong diantara rak koleksi dengan loker pengunjung, luas ruang koleksi pun masih terbatas dan toilet masih berada didalam ruang koleksi.

Berikut ini prasarana penunjang perpustakaan yang dimiliki Dinas Perpustakaan Kota Bekasi :

NO	URAIAN	JUMLAH	JUMLAH MENURUT SNP
1.	Rak Buku		Minimal 30 Buah
2.	Rak Majalah		Minimal 3 Buah
3.	Rak Audio Visual		Minimal 2 Buah
4.	Rak Buku Referensi	0	Minimal 7 Buah
5.	Meja Baca		Minimal 100 Buah
6.	Meja Kerja	5	Minimal 20 Buah
7.	Laci Katalog		Minimal 2 Buah
8.	Kursi Baca	0	Minimal 100 Buah
9.	Komputer		Minimal 5 Unit
10.	Alat Baca Tuna Netra		Minimal 5 Unit
11.	AC	0	Minimal 1 Unit
12.	Rak Display Buku Baru		Minimal 1 Buah
13.	Rak Surat Kabar	2	Minimal 2 Buah
14.	Jaringan Internet		
15.	Lemari Penitipan Tas		Minimal 2 Buah

Dalam penyediaan komputer internet untuk pemustaka, dalam SNP disebutkan bahwa setiap 10.000 jumlah penduduk sekurang-kurangnya disediakan 1 unit komputer yang terkoneksi dengan internet. Dinas Perpustakaan baru memiliki unit komputer untuk dipergunakan oleh pemustaka, masih kurang 270 unit komputer. Keberadaan sarana komputer ini dimanfaatkan dan didayagunakan oleh perpustakaan untuk mengembangkan e-library (perpustakaan digital) dan kepentingan pelayanan akses informasi.

Untuk sarana mobilitas kedinasan, Dinas Perpustakaan masih kekurangan kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2. Ketersediaan kendaraan dinas untuk mendukung mobilitas sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari untuk ke lapangan, baik untuk berkoordinasi maupun untuk mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Untuk sarana prasarana lainnya terbagi secara merata dan terbatas pada setiap unit kerja yang ada di Dinas Perpustakaan Kota Bekasi (sebagaimana data aset terlampir).

2.2.3 Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan di bidang perpustakaan diperlukan pembiayaan yang memadai. Alokasi anggaran bidang perpustakaan Tahun 2018 untuk Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 9.519.954.811,- tidak termasuk Gaji PNS atau sekitar 0,17% dari total APBD Kota Bekasi. Untuk itu diharapkan pada tahun-tahun berikutnya alokasi anggaran bidang perpustakaan agar lebih ditingkatkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan bidang perpustakaan yang menunjang kualitas pendidikan dan pencapaian Visi Kota Bekasi yang CERDAS

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Kota Bekasi

Sampai saat ini Kota Bekasi telah memiliki 12 Perpustakaan Kecamatan, 56 Perpustakaan Kelurahan, 45 Taman Baca Masyarakat, 5 Rumah Pintar dan 14 Perpustakaan di Kampung KB. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan mengemukakan syarat-syarat wajib sarana dan prasarana yang ada di sekolah dimana perpustakaan menjadi salah satu standar yang wajib ada di sekolah. Kota Bekasi telah mengikuti aturan tersebut dapat dilihat dari jumlah perpustakaan sekolah di Kota Bekasi sama banyaknya dengan jumlah sekolah yang ada, yang membedakan adalah kondisi ruangan perpustakaannya dan tenaga perpustakaan.

Perpustakaan sekolah dasar yang ada di Kota Bekasi sebanyak 675 yang berada di sekolah dasar negeri dan swasta, kondisi perpustakaan yang baik sebanyak 414 kondisi perpustakaan yang rusak sebanyak 508

Perpustakaan sekolah menengah pertama yang ada di Kota Bekasi sebanyak 271 berada di sekolah menengah pertama negeri dan swasta, kondisi perpustakaan yang baik sebanyak 211 kondisi perpustakaan yang rusak sebanyak 60

Perpustakaan sekolah menengah atas yang ada di Kota Bekasi sebanyak 94 berada di sekolah menengah atas negeri dan swasta, untuk kondisi perpustakaan pada perpustakaan sekolah menengah atas tidak tersedia datanya. Perpustakaan sekolah menengah kejuruan yang ada di Kota Bekasi sebanyak 128

2.3.1 Komposisi Jumlah Perpustakaan di Kota Bekasi

URAIAN	JUMLAH
Perpustakaan Kota	1
Perpustakaan Kecamatan	12
Perpustakaan Kelurahan	56
Taman Baca Masyarakat	64
Perpustakaan Sekolah Dasar	675
Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama	271
Perpustakaan Sekolah Menengah Atas	94
Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan	128

Salah satu komponen penting perpustakaan adalah ketersediaan koleksi bahan perpustakaan. Tanpa adanya koleksi bahan perpustakaan secara memadai dalam hal jumlah dan kualitas, perpustakaan tidak akan mampu memberikan layanan yang baik bagi penggunanya. Koleksi bahan perpustakaan atau sumber informasi merupakan salah satu kekuatan dan daya tarik utama bagi pengguna untuk datang memanfaatkan perpustakaan.

Berdasarkan data sampai dengan 2018 koleksi yang dimiliki Dinas Perpustakaan Kota Bekasi sebanyak 14.532 judul buku 50.232 eksemplar. Jumlah penduduk Kota Bekasi tahun 2017 berdasarkan data dari BPS Kota Bekasi sebanyak 2.873.484 Jiwa. Rasio ketersediaan koleksi bahan perpustakaan dibanding jumlah penduduk yang dilayani sebesar 1,74% menunjukkan jumlah rasio ketercukupan koleksi pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi masih dibawah standard rasio koleksi yang dibutuhkan, dimana satu koleksi untuk satu penduduk/pemustaka.

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan yang ada di Kota Bekasi, Dinas Perpustakaan Kota Bekasi telah melaksanakan program kemitraan dengan perpustakaan yang ada di Kota Bekasi yaitu layanan paket, dengan meminjamkan 1 paket buku yang berisi sekitar 150-200 judul buku kepada mitra perpustakaan dalam kurun waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Paket tersebut dapat dikembalikan dan meminjam paket buku yang lain atau memperpanjang buku tersebut. Namun karena keterbatasan koleksi buku maka banyak permintaan kemitraan yang belum dapat dipenuhi.

Untuk Pelayanan perpustakaan Kota Bekasi dilakukan selama 6 hari kerja mulai hari senin sampai dengan jumat, dengan jadwal dari jam 08.00 s.d 16.00 WIB sabtu dari jam 08.00-13.00. Untuk memperluas jangkauan layanan perpustakaan, Dinas Perpustakaan Kota Bekasi memiliki 2 unit mobil perpustakaan keliling bantuan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang beroperasi sebanyak 5 kali dalam seminggu dengan jangkauan wilayah seluruh kecamatan se Kota Bekasi dengan sasaran sekolah dasar.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Dinas Perpustakaan, pasal 29 menyatakan bahwa tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan memiliki kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Dalam pengelolaan perpustakaan, pustakawan dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan. Adapun tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Perpustakaan dapat diselenggarakan secara optimal apabila tersedia jumlah dan kualitas tenaga perpustakaan yang cukup. Jumlah dan kualitas tenaga perpustakaan sangat menentukan keberhasilan layanan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitas tenaga perpustakaan memegang peranan penting dalam meningkatkan kepuasan pemustaka. Kualitas tenaga perpustakaan dilihat dari kompetensi dan profesionalisme. Kompetensi dan profesionalisme tenaga perpustakaan dapat ditingkatkan dengan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta melalui evaluasi kualitas tenaga perpustakaan melalui uji kompetensi dan assesmen sertifikasi. Kualitas layanan perpustakaan sangat berpengaruh terhadap persepsi dan jumlah penggunaan perpustakaan umum sebagai ruang publik bagi masyarakat untuk berinteraksi, mengembangkan inovasi dan memperoleh inspirasi (*Library 3.0*). Kekurangan tenaga perpustakaan dikhawatirkan berdampak pada kualitas layanan perpustakaan umum dan tujuannya untuk mencerdaskan masyarakat tidak optimal.

Untuk meningkatkan SDM perpustakaan dari tahun 2014 s.d 2017 Dinas Perpustakaan melaksanakan bimbingan teknis untuk pengelola perpustakaan di kecamatan, kelurahan, sekolah dan TBM. Untuk tahun 2018 tidak melaksanakan kegiatan tersebut dikarenakan anggaran yang ada digunakan untuk menyusun Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan. Walaupun tidak ada bimtek kegiatan pembinaan untuk pengelola perpustakaan dilakukan oleh pustakawan dengan memberikan penyuluhan secara langsung ke lokasi dan bekerja sama dengan UPTD Pendidikan dilaksanakan pada saat rapat dengan kepala sekolah.

Berikut ini disampaikan data perkembangan perpustakaan umum Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2013 s.d 2017 dilihat dari jumlah anggota, jumlah pengunjung, jumlah peminjam buku, dan jumlah koleksi buku perpustakaan.

Tabel 2.5 Data Perkembangan Perpustakaan Umum Kota Bekasi

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Anggota	159				
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota	1.880 Org	4.146 Org	4.260 Org	5.666 Org	7.599 Org
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Keliling	3.911 Org	10.519 Org	7.971 Org	10.013 Org	13.086 Org
4	Jumlah Buku yang dipinjam	1035	1803	868	522	1363
5	Jumlah Judul Koleksi Buku	7859	10.316	12.438	13.204	13.604
6	Jumlah eksemplar Koleksi Buku	25.948	36.406	46.060	47.577	48.377

Berdasarkan data kunjungan pemustaka ke semua jenis layanan perpustakaan di atas, ketika dilakukan perbandingan dengan jumlah penduduk Kota Bekasi sebagai pengguna potensial perpustakaan, maka jumlah total kunjungan 15.679 kali, maknanya hanya sekitar 0,5% penduduk Kota Bekasi yang mengunjungi perpustakaan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan Daerah

2.4.1 Tantangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan Kota Bekasi banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang bersifat strategik baik dari internal maupun eksternal organisasi, yang menjadi tantangan yaitu :

- a. Banyaknya jumlah penduduk Kota Bekasi dimana pada Tahun 2017 sudah mencapai 2.873.484 jiwa dan luasnya wilayah Kota Bekasi 21.049 Ha terdiri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan menjadi tantangan bagi terselenggaranya pelayanan perpustakaan yang merata dan berkeadilan;
- b. Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai pengaruh amat besar terhadap segala aspek kehidupan saat ini. Pesatnya kemajuan teknologi informasi membuka kesempatan baru bagi perpustakaan untuk mengembangkan koleksi dari format konvensional ke format digital, mengembangkan layanan *onsite* ke layanan *online*, atau secara kompleksitas pengelolaan perpustakaan dari perpustakaan konvensional ke perpustakaan digital, Dinas Perpustakaan Kota Bekasi akan mengembangkan layanan perpustakaan digital untuk memperluas akses layanan perpustakaan;
- c. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi jika tidak disikapi dengan baik (penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga yang terampil dan profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi) akan menjadi bumerang yang menjadikan lembaga perpustakaan tertinggal jauh dibelakang, tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern;

- d. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparaturnya terhadap pentingnya perpustakaan mengakibatkan buruknya pengelolaan perpustakaan baik di tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan dan sekolah;
- e. Banyaknya perpustakaan yang ada di Kota Bekasi tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga tenaga fungsional pustakawan atau tenaga teknis perpustakaan yang menangani perpustakaan serta kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perpustakaan sehingga pemberdayaan perpustakaan kurang optimal.

2.4.2 Peluang

- a. Terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan beserta peraturan pelaksanaannya dan berubahnya status yang sebelumnya digabung dalam Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah menjadi Dinas Perpustakaan semakin menguatkan keberadaan dan meningkatkan daya tawar lembaga perpustakaan
- b. Revolusi mental yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, perpustakaan berkontribusi dalam penguatan mentalitas budaya kemandirian, gotong royong dan pelayanan, sebab fungsi perpustakaan mendorong perubahan pola pikir dan pembentukan karakter melalui kebiasaan membaca.
- c. Perpustakaan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, menyediakan beragam jenis sumber informasi baik cetak, tertulis maupun terekam yang jika dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat dapat menciptakan suatu tatanan masyarakat pembelajar.
- d. Adanya peraturan yang mengamanatkan bahwa sekolah/madrasah mengalokasikan dana untuk perpustakaan sekolah paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal.
- e. Adanya Gerakan Literasi Nasional yang merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antarunit utama pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DAERAH

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kota Bekasi yaitu :

- 1) Terbatasnya jumlah dan koleksi perpustakaan
- 2) Terbatasnya SDM perpustakaan
- 3) Kurang up date-nya koleksi perpustakaan daerah
- 4) Gedung yang belum representatif
- 5) Pelayanan perpustakaan yang belum merata ke seluruh wilayah
- 6) Pembinaan Perpustakaan yang belum optimal

Permasalahan yang ada pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan antara lain :

1. Kurangnya masyarakat yang memberdayakan perpustakaan, hal ini dapat dilihat dari data pengunjung perpustakaan Kota Bekasi tahun 2018 sebanyak 7.122 orang, untuk jumlah pengunjung perpustakaan keliling tahun 2018 sebanyak 8.127 orang. Berbagai macam penyebab kurangnya masyarakat mengunjungi perpustakaan yaitu :
 - a. Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat yang berbanding lurus dengan rendahnya partisipasi masyarakat dan kesadaran aparat terkait dalam pembinaan minat dan budaya baca di masyarakat;
 - b. Bangunan perpustakaan yang belum sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dilihat dari luas bangunan, ketersediaan ruangan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi perpustakaan serta lokasi yang kurang strategis;
 - c. Belum didukung SDM pengelola perpustakaan yang memadai baik dalam kualitas maupun kuantitas serta rendahnya pemahaman dan kesadaran pengelola perpustakaan dan pemegang kebijakan yang mengakibatkan terhambatnya pengembangan perpustakaan;
 - d. Koleksi yang ada di perpustakaan tidak mutakhir/up to date mengikuti kebutuhan pemustaka.
2. Pembinaan perpustakaan terkendala belum adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan perpustakaan di Kota Bekasi;
3. Kebutuhan informasi masyarakat yang semakin berkembang dan beragam menuntut perpustakaan mampu memberikan layanan informasi yang cepat, murah, dan tepat. Perluasan dan jangkauan layanan perpustakaan perlu dilakukan secara terstruktur dan masif serta berbasis IT

4. Masih rendahnya political will dalam pengalokasian anggaran untuk mengembangkan budaya baca masyarakat dan pembinaan perpustakaan dapat terlihat dari anggaran yang di dapat oleh Dinas Perpustakaan Tahun 2018 hanya sebesar 0,17% dari jumlah APBD Kota Bekasi.

Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kurangnya kualitas pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam meningkatkan literasi masyarakat untuk kesejahteraan	Kurangnya layanan dan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan se-Kota Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Gedung Perpustakaan Kota Bekasi belum representatif untuk menerapkan layanan berbasis inklusi sosial 2) Masih banyak sekolah yang belum memiliki ruang/ gedung perpustakaan sendiri 3) Kurangnya kualitas dan kuantitas pengelola perpustakaan yang profesional dan terampil 4) Kurangnya keragaman koleksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 5) Masih banyak layanan perpustakaan yang belum menggunakan teknologi informasi sehingga belum terintegrasinya sistem perpustakaan se-Kota Bekasi 6) Kurangnya prasarana penunjang layanan perpustakaan se-Kota Bekasi 7) Belum adanya regulasi pengelolaan perpustakaan sehingga pembinaan perpustakaan belum maksimal
2	Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber pengetahuan dan pusat kegiatan masyarakat yang masih kurang	Kurangnya Budaya baca dan literasi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya peran keluarga, komunitas dan pegiat literasi 2) Kurangnya kampanye budaya kegemaran membaca di masyarakat 3) Kurangnya penghargaan bagi pegiat literasi yang membantu pembudayaan kegemaran membaca 4) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembudayaan kegemaran membaca

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023, rumusan Visi Kepala Daerah adalah:

“ Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan “

Makna dari visi Pemerintah Kota Bekasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bekasi yang **Cerdas** bahwa Kota Bekasi senantiasa memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota cerdas (*smart City*), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.
2. Bekasi yang **Kreatif** bahwa warga Kota Bekasi memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreatif dan inovatif, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam, dibutuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat, dan pelaku usaha dalam beraktivitas, berkehidupan, dan berusaha.
3. Bekasi yang **Maju** mengandung arti bahwa pembangunan perekonomian masyarakat berkembang dengan baik dan mempunyai daya saing tinggi yang disertai dengan tumbuhnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan.
4. Bekasi yang **Sejahtera**, mengandung arti bahwa suatu kondisi keadaan masyarakat Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, dan maju dilengkapi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin sehingga tercipta suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman dan damai.
5. Bekasi yang **Ihsan** mengandung arti bahwa dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kesadaran berperilaku bagi warga kota dalam mentaati peraturan/perundangan yang berlaku. Makna ihsan bagi masyarakat luas adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Demikian pula warga Kota Bekasi senantiasa mengembangkan derajat keihsanannya melalui kedisiplinan dan ketertiban sosial dalam membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan.

Adapun Misi yang hendak dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
4. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman..

Mengacu pada pernyataan visi misi tersebut diatas, diantaranya yang paling sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Kota Bekasi adalah

Nomor 4: Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif.

Melalui misi ke-4, tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak mulia. Dengan sasaran tercapainya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif. Kinerja yang diharapkan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan dengan indikator kinerjanya adalah meningkatnya Indeks pendidikan.

Dinas Perpustakaan Kota Perpustakaan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam upaya pencapaian visi misi Pemerintah Kota Bekasi tersebut di atas. Perpustakaan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan masyarakat, menyediakan beragam jenis sumber informasi baik cetak, tertulis maupun terekam yang jika dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat dapat menciptakan suatu tatanan masyarakat yang berpengetahuan. Selain itu perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat berperan penting dalam mendukung pendidikan seumur hidup (*life long education*) menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis, dan inovatif yang berbasis pada budaya keilmuan.

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat Kota Bekasi perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat mempunyai peran dalam upaya peningkatan sumber daya manusia melalui penyediaan bahan pustaka terkait ilmu murni, ilmu terapan, sastra dan literature lainnya. Perpustakaan merupakan lembaga yang mampu memastikan setiap masyarakat memperoleh akses pengetahuan secara terbuka dimana dan kapan pun mereka berada.

Seiring dengan adanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam rangka menyesuaikan diri dengan arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi maka perpustakaan tidak hanya sekedar melayani pinjam buku dan penyediaan layanan internet saja, melainkan aktif menyelenggarakan kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan bersinergi dengan stake holder lain. Adapun kegiatan yang bisa dilaksanakan di perpustakaan berupa pelatihan berbagai macam keterampilan ataupun sosialisasi / penyuluhan berbagai hal yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menjadikannya mandiri dan sejahtera.

Perpustakaan berkontribusi besar dalam membangun masyarakat berpengetahuan (*Knowledge society*) melalui ikhtiar kolektif, untuk menumbuhkan tradisi dan budaya baca di dalam masyarakat:

- Masyarakat berpengetahuan merupakan bagian dari lapisan *critical mass* yang menjadi fondasi sosial sangat kokoh, untuk mendorong proses transformasi masyarakat menuju kehidupan yang maju;
- Masyarakat berpengetahuan merupakan penjelmaan suatu bangsa dengan capaian peradaban tinggi
- Masyarakat berpengetahuan selalu bersikap terbuka, adaptif, bersedia menerima ide-ide baru berasal dari mana pun, yang mengantarkan pada perubahan dan kemajuan;

- Masyarakat berpengetahuan lebih mudah menerima keragaman dan perbedaan, serta menghargai pluralitas dan multikulturalisme di masyarakat – cerminan dari watak kosmopolitanisme;

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L

3.3.1 Renstra Perpustakaan Nasional RI 2015-2019

Berdasarkan Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) Tahun 2015-2019 maka Visi PNRI adalah "Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca Dengan Memberdayakan Perpustakaan" selaras dengan tujuan dan sasaran dari Dinas Perpustakaan yaitu "Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi". Adapun Misi Perpustakaan Nasional RI yang selaras dengan Dinas Perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir;
2. Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas;
4. Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan profesional;
5. Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar membaca;

Untuk mencapai Visi dan Misi Perpustakaan Nasional menyusun sasaran strategis, adapun sasaran strategis yang selaras dengan Dinas Perpustakaan antara lain :

- a) Peningkatan pembudayaan kegemaran membaca;
- b) Pengembangan semua jenis perpustakaan;
- c) Peningkatan kualitas dan diversifikasi layanan perpustakaan;
- d) Peningkatan kualitas SDM perpustakaan;
- e) Peningkatan keragaman koleksi yang lengkap dan mutakhir dan pelestarian koleksi warisan budaya bangsa indonesia;
- f) Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan Nasional yang modern.

Tabel 3.3 Keterkaitan antara Sasaran Strategis Renstra K/L dengan Perangkat Daerah

SASARAN STRATEGIS		
PERPUSNAS	DISPUSIPDA PROV JABAR	DISPERPUS KOTA BEKASI
a) Peningkatan pembudayaan kegemaran membaca; b) Pengembangan semua jenis perpustakaan; c) Peningkatan kualitas dan diversifikasi layanan perpustakaan; d) Peningkatan kualitas SDM perpustakaan;		Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi melalui a. peningkatan pengunjung perpustakaan b. Peningkatan perpustakaan yang aktif c. Peningkatan keanekaragaman koleksi d. Peningkatan sistem perpustakaan yang terintegrasi

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis, dalam hubungannya dengan pengembangan bidang perpustakaan, disesuaikan dengan wilayah yang diproyeksikan untuk pengembangan pendidikan dan pemukiman padat penduduk. Idealnya tiap-tiap wilayah di kecamatan diharapkan ada 1 (satu) perpustakaan umum yang dibangun dekat dengan pusat pemerintahan atau wilayah pendidikan atau pemukiman penduduk. Wilayah yang belum dibangun perpustakaan, secara rutin atau berkala dapat dilayani dengan mobil perpustakaan keliling. Untuk itu diperlukan armada mobil perpustakaan keliling yang cukup. Kemudian untuk wilayah perkotaan, di beberapa sudut yang strategis dapat dibangun taman bacaan atau sudut baca.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Perpustakaan Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang (2018-2023) adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan kualitas dan sarana prasarana penunjang pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui ketersediaan akses terhadap informasi terapan dan ilmu pengetahuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui :
 - Meningkatkan pemberdayaan perpustakaan dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat
 - Pembangunan gedung perpustakaan Kota Bekasi yang representatif untuk masyarakat melakukan aktivitas literasi
 - Pembangunan gedung/ruangan perpustakaan yang nyaman di sekolah
 - Menambah jumlah pengelola perpustakaan dan meningkatkan kualitas dan kemampuannya sehingga dapat mengelola perpustakaan secara profesional dan terampil
 - Menambah jumlah keanekaragaman koleksi yang up to date dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 - Optimalisasi pemanfaatan IT (Teknologi Informasi) dalam pelayanan perpustakaan
 - Pengintegrasian sistem layanan perpustakaan se-Kota Bekasi
 - Menambah jumlah prasarana penunjang perpustakaan guna memberikan pelayanan perpustakaan yang prima
 - Membangun sinergitas perpustakaan sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi serta Taman Bacaan Masyarakat sebagai upaya pembinaan perpustakaan

b) Peningkatan budaya gemar membaca baik pada satuan keluarga, pendidikan, dan masyarakat melalui :

- Peningkatan peran keluarga, komunitas dan pegiat literasi dalam pembudayaan kegemaran membaca;
- Peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca di masyarakat melalui sosialisasi maupun penyuluhan;
- Pemberian penghargaan bagi pegiat literasi yang membantu pembudayaan kegemaran membaca;
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembudayaan kegemaran membaca;
- Pemanfaatan Anggaran dana kelurahan untuk pengembangan perpustakaan kelurahan dan taman baca masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BEKASI

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan Daerah Kota Bekasi

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi Wali Kota sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sebagaimana yang tertera di RPJMD Kota Bekasi Tahun 2019-2023 keberadaan Dinas Perpustakaan untuk mencapai Visi Kota Bekasi “**Cerdas**”, dan menjalankan Misi ke-4 yaitu “**Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berkualitas, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif**”. Salah satu tujuan ke 1 dari misi tersebut adalah “**Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak mulia**”. Untuk mencapai tujuan Kota Bekasi, Dinas Perpustakaan menetapkan tujuan “**Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi**”. Dengan meningkatnya minat baca masyarakat kota Bekasi, masyarakat lebih literate sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Sasaran yang ingin dicapai Kota Bekasi dalam mencapai tujuan 4.1 adalah “**Tercapainya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif**”. Untuk mencapai sasaran tersebut Dinas perpustakaan menetapkan sasaran “**Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi**” dengan indikator sasaran tersebut yaitu Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bekasi.

Minat baca masyarakat dapat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi pada masyarakat terhadap sumber bacaan tertentu dan ditunjukkan dengan keinginan yang kuat untuk melakukan kegiatan membaca. Untuk mengukur tingkat kebiasaan membaca masyarakat, diperlukan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan-perubahan yang terjadi. Alat ukur yang digunakan adalah Indeks Membaca Masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi yaitu :

1. Ketersediaan fasilitas membaca, ketersediaan fasilitas dapat diukur dari ketersediaan perpustakaan sekolah dan ketersediaan perpustakaan umum – termasuk perpustakaan kecamatan dan kelurahan, taman bacaan masyarakat.
2. Tingkat pemanfaatan sumber bacaan, dilihat dari rata-rata jumlah kepemilikan bahan bacaan, jumlah bahan bacaan, pemanfaatan bahan bacaan dan kunjungan ke perpustakaan.
3. Kebiasaan membaca masyarakat, diukur dari rata-rata durasi membaca, frekuensi membaca dan tujuan membaca

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, perlu dilakukan survey kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu hasil penghitungan survey tersebut diolah dan keluarlah nilai indeks kepuasan masyarakat yang dapat dijadikan bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu diperbaiki dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Adapun target dari tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan Kota Bekasi sebagaimana dalam tabel 4.2 dibawah ini

Tabel 4.2

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan Kota Bekasi
Tahun 2019-2023**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
1 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	1 Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	60	65	70	75	80
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bekasi	75	77	78	79	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, perlu disusun strategi dan kebijakan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Strategi Dinas Perpustakaan Kota Bekasi sebagai bentuk upaya mencapai tujuan dan sasaran “Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi”. Adapun indikator Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi, yaitu :

1. Ketersediaan fasilitas membaca dilihat dari ketersediaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum yang ada di Kota Bekasi;
2. Kebiasaan membaca masyarakat diukur dari rata-rata durasi membaca, rata-rata frekuensi membaca (dalam minggu) dan tujuan membaca dari masyarakat Kota Bekasi;
3. Tingkat pemanfaatan bahan bacaan dilihat dari rata-rata kepemilikan bahan bacaan (jumlah dan jenis), bahan bacaan yang dibaca perminggu, rata-rata kunjungan masyarakat ke perpustakaan dan keanggotaan perpustakaan

Dari ketiga indikator tersebut dirumuskan strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun (2018-2023) untuk mencapai target peningkatan minat baca masyarakat Kota Bekasi yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan sarana prasarana penunjang pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui ketersediaan akses terhadap informasi terapan dan ilmu pengetahuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
- b. Pembudayaan kegemaran membaca melalui tiga pilar yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Dalam perumusan arah kebijakan, Dinas Perpustakaan memperhatikan perkembangan peran perpustakaan di masa datang yang disesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional maupun provinsi serta menyesuaikan dengan paradigma dan perkembangan masyarakat. berikut ini perubahan paradigma tentang perpustakaan:

- a. Perpustakaan merupakan wadah pendidikan demokratis masyarakat dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Perpustakaan dapat berperan sebagai pusat pembelajaran masyarakat secara independen, sehingga perlu mendapatkan kepedulian dari semua pihak terutama fasilitas dari pihak pemerintah;
- c. Perpustakaan diarahkan mampu mengakomodasi berbagai perubahan kebutuhan dan keinginan masyarakat terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya dengan mewujudkan e-library;
- d. Perpustakaan diarahkan mampu mengembangkan kerjasama yang saling mendukung serta menguntungkan dengan seluruh pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- e. Perpustakaan diarahkan untuk dapat mengikuti perkembangan dan berperan secara nyata dalam proses pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui penyelenggaraan kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan bersinergi dengan stake holder lainnya berupa sosialisasi/penyuluhan dan pelatihan berbagai keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga menjadikannya mandiri dan sejahtera.

Mengacu perubahan paradigma tentang perpustakaan, maka disusunlah arah kebijakan yang akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan oleh unit kerja yang bertugas di lingkungan Dinas Perpustakaan Kota Bekasi yang selaras dengan strategi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakannya sebagai berikut :

1. Membangun Gedung Perpustakaan Kota Bekasi yang representatif
2. Meningkatkan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan;
3. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan perpustakaan;
4. Meningkatkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
5. Membangun resource sharing antar perpustakaan di Kota Bekasi
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional pustakawan;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sertifikasi kompetensi pustakawan;
8. Meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, dan pelatihan kepustakawanan
9. Promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
10. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat serta sarana pendukung proses belajar mengajar di sekolah
11. Memperkuat kapasitas kelembagaan perpustakaan dalam pengembangan layanan;
12. Membangun sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan;

13. Memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta dan berbagai komunitas dan perorangan (ahli) untuk membangun komunitas.

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perpustakaan Kota Bekasi
Tahun 2018-2023

VISI KOTA BEKASI : CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN			
Misi IV Kota Bekasi : Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berpengetahuan, Sehat, Berakhlak Mulia, Kreatif dan Inovatif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi Indikator Tujuan: Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi Indikator Sasaran : Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	1. Meningkatkan kualitas dan sarana prasarana penunjang pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui ketersediaan akases terhadap informasi terapan dan ilmu pengetahuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	1. Membangun Gedung Perpustakaan Kota Bekasi yang representatif 2. Meningkatkan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; 3. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan perpustakaan; 4. Meningkatkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; 5. Membangun resource sharing antar perpustakaan di Kota Bekasi 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional pustakawan 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sertifikasi kompetensi pustakawan;
		2. Pembudayaan kegemaran membaca melalui tiga pilar yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat	1. Promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; 2. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat serta sarana pendukung proses belajar mengajar di sekolah 3. Memperkuat kapasitas kelembagaan perpustakaan dalam pengembangan layanan; 4. Membangun sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan; 5. Memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta dan berbagai komunitas dan perorangan (ahli) untuk membangun komunitas.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2019-2023 adalah sebagaimana terlampir.

BAB VII

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan Kota Bekasi yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2019-2023 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan Kota Bekasi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2019-2023

No	Indikator Renstra OPD	Formulasi	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Tahun N dikurangi Jumlah Kunjungan Tahun n-1 dibagi Jumlah kunjungan tahun n-1 dikali 100%	Data 2018 610.329 Org (18.20%)	35%	35%	35%	35%	35%	35%
2	Persentase Perpustakaan yang aktif	Jumlah Perpustakaan Yang Aktif/Jumlah perpustakaan yang ada di Kota Bekasi x 100%	323 51.68%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
3	Persentase Keanekaragaman Koleksi	Jumlah Judul/Jumlah Eksemplar x 100%	28.93% 14.523 Judul 50.232 Eks	30%	35%	40%	45%	50%	50%
4	Persentase Perpustakaan yang terintegrasi sistem informasi perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang terintegrasi/jumlah perpustakaan di Kota Bekasi	0	2%	2%	2%	2%	2%	2%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2019 – 2023 merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan aktif dalam pembangunan bidang perpustakaan.

Sasaran rencana strategis Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2019 – 2023 adalah fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak. Sasaran tersebut meliputi sasaran Pemerintah Kota Bekasi dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja lingkup Dinas Perpustakaan Kota Bekasi. Untuk itu, dengan pengarahan dan pengendalian langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kinerja (Renja) Tahunan. Pencapaian sasaran tersebut ditetapkan berdasarkan program-program yang tercantum dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan pembiayaan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah termasuk oleh masyarakat dan swasta serta pembiayaan luar negeri berupa grant/hibah..

Monitoring dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2019 – 2023 tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja unit-unit di lingkup Dinas Perpustakaan yang menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Evaluasi umum pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2019 – 2023 dilaksanakan pada akhir periode dan dibuat sebagai evaluasi resmi kinerja Dinas dalam melaksanakan Renstra Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2019 – 2023 sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis periode berikutnya.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2019 – 2023 hendaknya dijalankan dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Dinas Perpustakaan secara keseluruhan sebagai wujud pengabdian kepada nusa dan bangsa. Terlebih kepada Allah SWT.

Demikian rencana strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan bidang perpustakaan Tahun 2019 – 2023. Disadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan sesuai perkembangan kebijakan. Namun demikian dokumen ini telah disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek dan potensi yang ada, situasi perkembangan masyarakat, Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 – 2023 serta perkembangan regional/global disamping perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Dinas Perpustakaan Kota Bekasi, sehingga pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.

WALI KOTA BEKASI

RAHMAT EFFENDI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN

KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi			Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi									
	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi		Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	55,21	60	65	70	75	80	80	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Program pelayanan administrasi perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran listrik, Telp dan Internet	Rp41.941.711	Rp50.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah OB dan Alat Kebersihan	Rp70.000.000	Rp70.000.000	Rp75.000.000	Rp80.000.000	Rp85.000.000	Rp90.000.000	Rp90.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	Rp67.777.000	Rp70.000.000	Rp80.000.000	Rp85.000.000	Rp90.000.000	Rp95.000.000	Rp95.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	Rp64.500.000	Rp90.000.000	Rp100.000.000	Rp110.000.000	Rp120.000.000	Rp130.000.000	Rp130.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi

		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan makan dan Snack	Rp60.000.000	Rp35.000.000	Rp50.000.000	Rp75.000.000	Rp100.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Jumlah Orang yang melaksanakan perjalanan dinas	Rp204.420.000	Rp200.000.000	Rp250.000.000	Rp300.000.000	Rp350.000.000	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan Penyediaan Kjsa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Rp323.100.000	Rp369.900.000	Rp400.000.000	Rp500.000.000	Rp600.000.000	Rp700.000.000	Rp700.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyebarluasan informasi	Rp41.750.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Penataan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp1		
		Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Rp0	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair	Rp0	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp100.000.000	Rp70.000.000	Rp75.000.000	Rp80.000.000	Rp85.000.000	Rp90.000.000	Rp90.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi

		Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Rp20.000.000	Rp15.000.000	Rp20.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana Kerja	Jumlah Laporan	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan	Rp20.000.000	Rp15.000.000	Rp20.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Program Budaya Gemar Membaca	Persentase Perpustakaan yang aktif	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Penyusunan Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Safari Gerakan Membaca	Jumlah kegiatan seminar/workshop / Bedah buku untuk mengembangkan minat baca	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Pemilihan Duta Perpustakaan dan Duta Baca Kota Bekasi	Jumlah duta perpustakaan kota bekasi untuk mengikuti ke tingkat provinsi dan nasional	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Lomba Perpustakaan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan TBM	Jumlah perpustakaan dan pengelola perpustakaan SD, SMP dan TBM terbaik di Kota Bekasi	Rp0	Rp	Rp120.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Lomba Literasi	Jumlah lomba literasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi

		Gerakan Bekasi Membaca	Jumlah event peringatan hari perpustakaan dan jumlah peserta	Rp72.400.000	Rp300.000.000	Rp200.000.000	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Perpustakaan Sekolah	Jumlah Jenis pelatihan peningkatan kapasitas Pengelola perpustakaan dan jumlah peserta	Rp0	Rp0	Rp200.000.000	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Perpustakaan Masyarakat	Jumlah Jenis pelatihan peningkatan kapasitas Pengelola perpustakaan dan jumlah peserta	Rp0	Rp0	Rp200.000.000	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah kegiatan seminar/workshop / Bedah buku untuk mengembangkan minat baca	Rp0	Rp0	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan Super visi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan sekolah SD, SMP dan Perpustakaan Masyarakat	Jumlah perpustakaan yang dibina	Rp0	Rp0	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Program Pengembangan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
			Persentase Sistem Perpustakaan yang Terintegrasi	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
			Persentase Keanekaragaman Koleksi	30%	35%	40%	45%	50%	55%	55%	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi

		Pembangunan Gedung Perpustakaan	Jumlah Gedung Perpustakaan yang Representatif	Rp0	Rp0	Rp20.000.000.000					Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Pengadaan sarana dan Prasarana Penunjang Perpustakaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Perpustakaan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Penyusunan Masterplan/roadmap penyelenggaraan perpustakaan kota bekasi	Jumlah dokumen pengembangan perpustakaan kota bekasi	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp125.000.000	Rp150.000.000	Rp175.000.000	Rp200.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Perpustakaan Digital	Jumlah Koleksi dan jumlah pengakses	Rp0	Rp100.000.000	Rp150.000.000	Rp100.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Perpustakaan Keliling	Jumlah titik layanan perpustakaan keliling	Rp125.000.000,-	Rp225.000.000,-	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Kota Bekasi	Jumlah pelayanan perpustakaan di hari sabtu-minggu	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp125.000.000	Rp150.000.000	Rp175.000.000	Rp250.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan pengenalan perpustakaan pada anak usia dini	Jumlah Anak yang berkunjung ke Perpustakaan	Rp278.217.500	Rp0	Rp200.000.000	Rp250.000.000	Rp275.000.000	Rp300.000.000	Rp325.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan pustaka/Buku yang diadakan dan diolah	Rp0	Rp0	Rp200.000.000	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan preservasi koleksi perpustakaan	Jumlah Koleksi yang Terpelihara koleksi perpustakaan melalui perbaikan koleksi, fumigasi dan pembasmi rayap	Rp62.500.000	Rp0	Rp75.000.000	Rp75.000.000	Rp75.000.000	Rp75.000.000	Rp75.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi
		Kegiatan pemeliharaan dan peningkatan sarana aplikasi	Jumlah Aplikasi yang terpeliharanya aplikasi	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi

		perpustakaan	perpustakaan dan tersedianya sarana penunjang aplikasi									
		Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan TIK Perpustakaan (Pengintegrasian Sistem Layanan Perpustakaan Se-Kota Bekasi	Jumlah perpustakaan yang menerapkan TIK pada pelayanan perpustakaan	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Dinas Perpustakaan	Kota Bekasi